

ABSTRAK

Tindakan penangguhan ekspor dan impor adalah kebijakan pemerintah suatu negara untuk membatasi perdagangan dengan negara tertentu atau dengan pertukaran barang tertentu, penangguhan ekspor dan impor terjadi akibat dari situasi politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan dari suatu negara. Pada Maret 2019, Cina telah melakukan penangguhan impor biji kanola dari Kanada dengan mencabut izin impor dari perusahaan Richadrson dan Vittera. Cina menduga adanya hama *Leptosphaeria Maculans* yang dapat menyebarkan penyakit *Blackleg* pada tanaman di Cina. Pemerintah Cina tidak memberikan bukti ilmiah berupa hasil uji penelitian yang membuktikan adanya hama tersebut. Hal ini memberikan dampak penurunan permintaan biji kanola dan mempengaruhi harga kanola global. Tindakan penangguhan impor oleh Cina tersebut menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai hambatan teknis dan apakah tindakan Cina dengan tidak memberikan bukti ilmiah merupakan pelanggaran terhadap SPS *Agreement*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bahan hukum yang dikumpulkan melalui *library research* dan *web research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cina tidak konsisten terhadap *Article I GATT*, *Article XI GATT* dan *Article XX GATT* yang menunjukkan bahwa Cina melakukan tindakan diskriminasi yang sewenang-wenang, pembatasan kuota impor yang menimbulkan hambatan teknis perdagangan. Kemudian, Cina tidak konsisten dengan *Article II* dan *Article V SPS Agreement* karena tidak dapat membuktikan bukti ilmiah sesuai dengan prinsip *scientific evidence* dan melakukan tindakan SPS tanpa didasari bukti ilmiah. Saran penulis yaitu dengan tidak melakukan tindakan diskriminasi yang menimbulkan hambatan perdagangan yang berlebihan dan melakukan tindakan SPS berdasarkan dengan bukti ilmiah yang valid serta antara negara importir dan eksportir melakukan koordinasi penanggulangan apabila terjadi serangan serangan hama.

Kata Kunci: Hambatan Teknis, Penangguhan impor, Non Diskriminasi, SPS Agreement

ABSTRACT

The act of suspending exports and imports is a government policy of a country to limit trade with certain countries or by exchanging certain goods, the suspension of exports and imports occurs as a result of the unfavorable political and economic situation of a country. In March 2019, China suspended imports of canola beans from Canada by revoking import permits from companies Richadrson and Vittera. China suspects that there is a pest *Leptosphaeria Maculans* that can spread Blackleg disease on plants in China. The Chinese government does not provide scientific evidence in the form of research test results that prove the existence of these pests. This has the effect of decreasing demand for canola beans and affecting global canola prices. The suspension of imports by China raises the question of whether the action can be categorized as a technical obstacle and whether China's action by not providing scientific evidence is a violation of the SPS Agreement. This study uses a normative juridical approach and legal materials collected through library research and web research. The results of the study show that China is inconsistent with Article I GATT, Article XI GATT and Article XX GATT which shows that China is carrying out arbitrary discrimination, limiting import quotas which creates technical barriers to trade. Then, China was inconsistent with Article II and Article V of the SPS Agreement because it could not prove scientific evidence in accordance with the principles of scientific evidence and carried out SPS actions without being based on scientific evidence. The author's suggestion is not to discriminate which causes excessive trade barriers and take SPS actions based on valid scientific evidence and between importing and exporting countries to coordinate prevention in the event of pest attacks.

Keywords: Technical Barriers, Suspension of Imports, Non-Discrimination, SPS Agreement